



Anggota DPRD Makassar dapat PIN Imitasi

Anggota DPRD Makassar Dapat Pin Imitasi

Perlengkapan Pelantikan Anggota DPRD Makassar

Pin emas 10 gram
Rp 40 juta
1 orang, 2 pin

50 Pakelan seragam

PSH
Rp 1,5 juta/orang
Rp 75 juta

PSL
Rp 2,15 juta/orang
Rp 107,5 juta

PDH
Rp 3 juta/orang
Rp 150 juta

PSR
Rp 1,5 juta/orang
Rp 75 juta

Anggaran untuk seragam
Rp 407,5 juta

Pin emas + seragam
Rp 2,42 miliar

Ketua DPRD Makassar mendapatkan fasilitas berupa rumah jabatan. Sementara 49 anggota dewan lainnya mendapatkan tunjangan perumahan

Daftar Anggota DPRD Makassar Terpilih 2024/2029

Dapil 1 (6 kursi)	Nama	Suara	Partai
	Dr. Fahrizal Arrahman Husain	12.103	PKB
	Eris Hares	7.536	Gerindra
	Andi Suhada Sappatie	4.586	PKP
	Ruslan Mahmud	5.485	Golkar
	Iwan Djafir	7.183	NasDem
	Arwer Fatma	3.203	PKS
	Muchlis Mubah	8.125	Hanura
	Ressi	4.896	Demokrat
	Fauzuddin Rusli	5.509	PPP

Dapil 2 (10 kursi)	Nama	Suara	Partai
	Basdir	3.152	PKB
	A. Pahlevi	3.024	Gerindra
	Wahono	4.016	PKP
	Muhammad Yulianto Badwi	10.489	Golkar
	Imam	8.715	Golkar
	Ruslan Lallo	5.870	NasDem
	Syaiful	4.311	NasDem
	Irfan Muthawirang	8.187	PAN
	Ray Suryadi Arsyad	6.758	Demokrat
	Rahmat Taqwa Qurais	3.783	PPP

Dapil 3 (11 kursi)	Nama	Suara	Partai
	Zunajar	3.746	PKB
	Irisa	1.854	Gerindra
	Dr. Udin Shaputra Malik	6.878	PKP
	Andi Suharmika	7.081	Golkar
	M. Yahya	5.094	PAN
	A. Cahika Cakra Satriawan	3.747	PAN
	Andi Hadi Ibrahim Baso	7.892	PKS
	H. Sangkoto Sodikin	4.592	PAN
	Tri Sukirman Ahmad	5.137	Demokrat
	Yulus Patandianan	4.475	Perindo
	Melisoni Kecca	5.027	PPP

Dapil 4 (10 kursi)	Nama	Suara	Partai
	Imam Musakkar	6.485	PKB
	Kasruki	5.427	Gerindra
	Mesakh R. Rantapadang	5.237	PKP
	Eshin Usami Nur Rahmatan	7.556	Golkar
	Supratman	6.788	NasDem
	Jufri Pute	6.317	NasDem
	Azwar Rasmin	4.805	PKS
	Hartono	3.878	PKS
	Muhammad Nasir R	5.844	PAN
	Umriyati	3.652	PPP

Dapil 5 (10 kursi)	Nama	Suara	Partai
	Andi Moknur Burhanuddin	2.208	PKB
	Muti. Farid Royandira	6.489	Gerindra
	Budi Hastuti	5.177	Gerindra
	Andi Tanti Uj. Idris	4.765	PKP
	Arifin Majid	4.546	Golkar
	Ari Astari Itham	5049	NasDem
	Adi Akbar	6844	PKS
	Reseki Nur	5.741	PKS
	Irmawati Sila	5.349	Hanura
	Iwan Hasan	4.602	PPP

(1) **MAKASSAR, TRIBUN** - Sebanyak 50 anggota DPRD Makassar akan dilantik hari ini, Senin (9/9). Untuk outfit atau perlengkapan pakaian 50 anggota DPRD Makassar, Sekretarisariat DPRD Makassar mesti merogoh anggaran hingga Rp 2,42 miliar.

Setiap anggota DPRD Makassar telah diberikan empat seragam. Mulai

dari pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian dinas harian (PDH) dan pakaian sipil resmi (PSR).

Tak hanya itu, saat pelantikan, setiap anggota dewan yang dilantik juga bakal mendapat dua pin emas. Masing-masing pin emas seberat 10 gram. Se-

■ ke halaman 7

(2) **Anggota DPRD Makassar Dapat Pin Imitasi**

tiap pin emas senilai Rp 40 juta.

Kepala Bagian Humas DPRD Kota Makassar Syahril mengatakan, kantor DPRD Makassar sudah disetorkan usul gladi bersih pada Sabtu (7/9/2024). "Terlepas sejauh ini sudah 99 persen kami sudah lakukan gladi, termasuk berkoordinasi dengan kepolosan, Satpol PP, BPBD, PD Parkir, dan instansi terkait lainnya," ucapnya kepada Tribun Timur, Minggu (8/9/2024).

Rapat Paripurna pembentukan anggota DPRD Makassar 2019-2024 akan berlangsung pada Senin (9/9/2024) di II 3 Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar di Ap Pettarani pukul 10.00 wita.

Para wakil rakyat tersebut akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar.

Tiga anggota dewan terpilih akan mewakili penyertaan atribut pada proses pelantikan ini.

Andi Suhada Sappatie mewakili anggota legislatif perempuan dan agama Islam, ERF-Horas mewakili Kristen Katolik, dan Mesak Raymond Rantapadang mewakili Kristen Protestan.

Hanya saja sekretariat DPRD Makassar menyapkan opsi penyertaan pin emas imitasi, mengingat pin emas yang dipesan melalui e-catalog belum selesai 100 persen.

"Atribut anggota dewan sudah siap, sisa pin emas, kita berharap bisa selesai malam ini (tadi malam), kalau tidak selesai kita siapkan pin emas imitasi," ungkapnya kepada Tribun Timur, Minggu (8/9/2024).

Sebelumnya diberitakan, Sekretarisariat DPRD Makassar M Dahyal mengatakan, masing-masing anggota dewan akan mendapatkan 2 pin emas dengan berat 10 gram/pin.

Biaya pengadaan pin emas sebesar Rp4 miliar, jika diupayakan masing-masing legislator dibekali pin emas seharga Rp40 juta.

Selain pin emas, para anggota dewan juga dilantik empat jenis baju sebagai seragam berkantor.

Keempat baju dinas itu untuk pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian dinas harian (PDH) dan pakaian sipil resmi (PSR).

Untuk PSH seharga Rp1,5 juta/satu anggota dewan, total untuk biaya PSH sebanyak Rp75 juta (50 anggota DPRD).

Kemudian PSL seharga Rp2,15 juta (total Rp21,5 juta untuk 50 anggota DPRD), PDH seharga Rp3 juta (total Rp30 juta) dan PSR Rp1,5 juta (total 75 juta).

Total keseluruhan biaya seragam anggota dewan untuk 50 orang dengan 4 jenis pakaian sebesar Rp407,5 juta.

Sehingga total keseluruhan anggaran untuk pelantikan anggota DPRD Makassar mulai dari pin emas hingga seragam mencapai Rp2,42 miliar.

Cecita Rudianto, Politisi Partai NasDem Rudianto Lallo melepas masa kerjanya di DPRD Makassar, mulai hari ini. Ia telah

menjabat sebagai anggota DPRD Makassar selama dua periode.

Rudianto Lallo menceraikan, DPRD Makassar mengundangi empat wali kota selama satu periode.

Jalah Iqbal Samud Suhubi, menjabat wali kota sementara pada 13 Mei 2019 hingga 13 Mei 2020.

Sekanjutnya Yusran Jusuf Pja wali kota dengan masa kerja paling singkat, 13 Mei 2020 hingga 26 Juni 2020.

Kemudian Rudi Djamaudin pada 26 Juni 2020 hingga 26 Februari 2021.

Pada masa Prof Rudy, hubungan antara DPRD dan eksekutif tak harmonis, sebagai bentuk penolakannya, DPRD Makassar kompak tidak mengesahkan APBD Perubahan 2020.

Sekanjutnya, kepemimpinan Kota Makassar kembali diambil oleh Danny Pomanto usai memenangkan kontestasi Pilkada Makassar.

"Dimanusia 5 tahun ini luar biasa, karena lima tahun ini rupanya DPRD menghadap empat wali kota. Pak Iqbal, Prof Yusran, Prof Rudi, dan Pak Danny, luar biasa pengabdian DPRD menghadap 4 wali kota. Ini sejarah juga bagi kami karena ada empat wali kota selama periode kami," ucap Rudianto Lallo.

Belum lagi, tantangan paling besar yang dihadapi ialah saat dunia dilanda covid-19, penyakit menular yang mengancam kesehatan masyarakat.

Kala itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan agar seluruh pemerintah daerah melakukan reforesing anggaran untuk penan-

Sambungan Hal.1

ngan covid-19.

Di saat itu juga, presiden mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Diantaranya meliputi honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan.

"Begitu covid tiba, Perpres 33 lahir yang mengatur hak keuangan dan protokol DPRD. Kalau duit DPRD keluar kota dipersamakan seperti ASN, uang harian kalau ke Jakarta Rp300 ribu, bagi DPR itu tekanan yang tinggi, ekspektasi harapan, fakta terhadap wakil rakyat tidak di dukung oleh sumber daya yang kuat atau besar," ujarnya.

Yang disyukuri kata pria kelahiran 4 Juni 1982 ini, lima tahun terakhir ini tidak pernah ada polemik yang besar antar anggota DPRD, begitu juga dengan eksekutif.

Mereka telah bersepakat bahwa urusan dan kepentingan partai bukanlah di luar kepentingan politik.

Menurut alumnus hukum Universitas Hasanudin Makassar ini, keberhasilan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto juga ada andil legislator DPRD Makassar di dalamnya.

"Tapi kita di sini DPR memposisikan diri sebagai penyelenggara pemerintahan, sehingga kalau ada perbedaan pendapat selalu ada jalan-jalan solusinya," tuturnya. (am)